



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pogram Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional
Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145
Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Nanjung

Skripsi

Oleh

Harry Fauzan Muhamad Taufiq

2017310084

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pogram Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional
Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145
Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Nanjung

Skripsi

Oleh

Harry Fauzan Muhamad Taufiq

2017310084

Pembimbing :

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Harry Fauzan Muhamad Taufiq
Nomor Pokok : 2017310084
Judul : Analisis Ketidapatuhan Pelaksana Operasional Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145 Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Nanjung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 13 Januari 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

: 

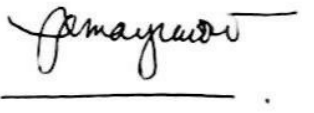
Sekretaris

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

: 

Anggota

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Harry Fauzan Muhamad Taufiq

NPM : 2017310084

Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik

Judul : Analisis Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional
Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145 Tahun 2018 tentang
BUMDes Di Desa Nanjung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan pertanggung jawaban dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 5 Januari 2022



Harry Fauzan Muhamad Taufiq

ABSTRAK

Nama : Harry Fauzan Muhamad Taufiq

NPM : 2017310084

Judul : Analisis Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145 Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Nanjung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pasti yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan unit usaha bank sampah dan unit usaha jasa keuangan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa. Teori yang digunakan adalah teori Sumber-Sumber Ketidakpatuhan yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver dengan 6 dimensi yaitu Insentif dan Sanksi, Pemantauan, Sumber Daya, Masalah Otonomi, Masalah Informasi, Sikap dan Keyakinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada Kepala Unit Penyewaan Alat-alat pesta, Kepala Unit Usaha bank sampah, Kepala Unit Usaha Jasa Keuangan dan Wakil Ketua Pengawas di BUM Desa Nanjung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pasti yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan unit usaha bank sampah dan unit usaha jasa keuangan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa yaitu insentif yang tidak sesuai dengan yang sudah mereka kerjakan, tidak adanya sanksi, sumber daya manusia yang tidak memadai, otonomi tidak diberikan keleluasaan oleh petinggi BUMDes dan keyakinan pelaksana operasional yang merasa dengan tidak dilaksanakannya kegiatan dapat diterima oleh masyarakat

Kata Kunci : Ketidakpatuhan, Pelaksana Operasional, Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

Name : Harry Fauzan Muhamad Taufiq

NPM : 2017310084

Title : Analysis of Operational Implementers' Non-compliance with the Decision of the Nanjung Village Head Number 145 of 2018 concerning BUMDes in Nanjung Village

This study aims to determine the exact cause that causes operational implementers not to carry out the waste bank business unit and financial services business unit that has been decided by the Village Head. The theory used is the theory of Sources of Disobedience proposed by R. Kent Weaver with 6 dimensions, namely Incentives and Sanctions, Monitoring, Resources, Autonomy Problems, Information Problems, Attitudes and Beliefs.

The research method used is qualitative with a case study approach. The data collection technique is through interviews. Interviews were conducted with the Head of Party Equipment Rental Unit, Head of Waste Bank Business Unit, Head of Financial Services Business Unit and Deputy Head of Supervisor at BUM Desa Nanjung.

The results of this study indicate that the exact causes that cause operational implementers do not carry out the waste bank business unit and financial services business unit that have been decided by the Village Head are incentives that are not in accordance with what they have been doing, no sanctions, inadequate human resources, autonomy is not given flexibility by BUMDes officials and the confidence of operational implementers who feel that not carrying out activities can be accepted by the community

Keywords: Non-compliance, Operational Executors, Village Owned Enterprises

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan pada Tuhan YME karena dengan rahmat dan karuniyan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Rancangan Penelitian ini dengan baik yang berjudul *“Analisis Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional Terhadap Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145 Tahun 2018 tentang BUMDes Di Desa Nanjung.”*

Skripsi ini merupakan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada jenjang pendidikan Strata Satu pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan juga mungkin kesalahan yang dibuat oleh penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak adanya bantuan, dan dorongan dari pihak lain. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih banyak yang pertama kepada Allah SWT, atas segala Rahmat, dan Hidayah.

Dalam Kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si., selaku Dosen Pembimbing, yang telah sabar, dan banyak meluangkan waktunya untuk membimbing

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik

2. Bapak Mangadar Situmorang., Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan
3. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung.
4. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA, selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si., Ibu Gina Ningsih Yuwono Dra., M.Si, Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si, Ibu Tutik Rachmawati, SIP., MA., PhD, , Dra., M.Si., Bapak Dr. Pius Suratman Kartasmita PhD, Bapak Dr. Ulber Silalahi, Drs., M.A, Ibu Indraswari, M.A., Ph.D., Bapak Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs., M.Si., Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.,, Bapak Dr. Dudung Sumahdumin, Bapak Dr. Yaya Mulyana, Drs., M.Si. yang telah banyak mengajari pelajaran kepada penulis selama menjadi mahasiswa Unpar.
6. Kedua Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan, hingga saat ini.
7. Bapak Dian Irawan, S.E., selaku Kepala Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
8. Bapak Uden, selaku Wakil Pengawas Badan Usaha Milik Desa Nanjung
9. Bapak Asep, selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Nanjung

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang juga telah mendukung penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga rancangan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 5 Januari 2022



Harry Fauzan Muhamad Taufiq

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Kepatuhan	10
2.2 Perspektif Kepatuhan dan Ketidakpatuhan	11
2.2.1 Perspektif Aktor Rasional	11
2.2.2 Perspektif Ekonomi Prilaku	11
2.3 Sumber Kepatuhan dan Ketidakpatuhan	12
2.3.1 Incentives and Sanctions (Insentif dan Sanksi)	13
2.3.2 <i>Monitoring</i> (Pemantauan)	13
2.3.3 <i>Resources</i> (Sumber Daya)	14
2.3.4 <i>Autonomy Problems</i> (Otonomi)	15
2.3.5 <i>Information problems</i> (Informasi)	15
2.3.6 <i>Attitudes and Beliefs</i> (Sikap dan Keyakinan)	16

2.4	Model Penelitian	16
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
3.1	Tipe Penelitian	19
3.2	Lokasi Penelitian	20
3.3	Partisipan Penelitian	20
3.4	Prosedur Pengumpulan Data	20
3.4.1	Wawancara	20
3.5	Analisis Data	21
3.6	Pengujian Keabsahan Data.....	23
BAB IV	24
GAMBARAN UMUM	24
4.1	Gambaran Umum Desa Nanjung.....	24
4.1.1	Kondisi Geografis.....	24
4.1.2	Visi dan Misi Desa Nanjung	25
4.1.3	Kependudukan	25
4.2	Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Nanjung	26
4.2.1	Profil Badan Usaha Milik Desa Nanjung.....	26
4.2.2	Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Nanjung	27
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Nanjung	27
4.2.4	Kegiatan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Nanjung.....	28
4.2.5	Struktur Organisasi.....	29
BAB V	30
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	30
5.1	Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa Nomor 145 Tahun 2018	30
5.2	Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional terhadap Keputusan Kepala Desa Nomor 145 Tahun 2018	42
5.2.1.	Insentif dan Sanksi.....	42
5.2.2.	Pemantauan	51
5.2.3.	Sumber Daya	56
5.2.4.	Otonomi	63

5.2.5.	Informasi	67
5.2.6.	Sikap dan Keyakinan.....	73
BAB VI	79
KESIMPULAN DAN SARAN	79
6.1	Kesimpulan	79
6.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.3.1 Jumlah Penduduk Desa Nanjung.....	26
Tabel 4.2.5.1 Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Nanjung.....	29
Tabel 5.1.1.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Penyewaan Alat-Alat Pesta, Ketua Unit Bank Sampah dan Wakil Ketua Pengawas Badan Usaha Milik Desa.....	31
Tabel 5.1.1.2 Reduksi Data Pelaksanaan Unit Usaha Penyewaan Alat-Alat Pesta.....	32
Tabel 5.1.2.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah, Ketua Unit Penyewaan Alat-Alat Pesta, Ketua Unit Jasa Keuangan dan Wakil Ketua Pengawas Badan Usaha Milik Desa.....	35
Tabel 5.1.2.2 Reduksi Data Pelaksanaan Unit Usaha Bank Sampah.....	37
Tabel 5.1.3.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Jasa Keuangan, Ketua Unit Bank Sampah, Ketua Unit Penyewaan Alat-Alat Pesta dan Wakil Ketua Pengawas Badan Usaha Milik Desa.....	39
Tabel 5.1.3.2 Reduksi Data Pelaksanaan Unit Usaha Jasa Keuangan.....	40
Tabel 5.2.1.1.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Penyewaan alat-alat.....	42
Tabel 5.2.1.1.2 Reduksi Data tentang Insentif yang diberikan oleh BUMDes.....	43

Tabel 5.2.1.2.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	47
Tabel 5.2.1.2.2 Reduksi Data tentang Sanksi.....	48
Tabel 5.2.2.1.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	51
Tabel 5.2.2.1.2 Reduksi Data tentang Kegiatan unit usaha mudah untuk dipantau.....	52
Tabel 5.2.2.2.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	54
Tabel 5.2.2.2.2 Reduksi Data tentang Pemantauan dilakukan secara tim.....	54
Tabel 5.2.3.1.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	57
Tabel 5.2.3.1.2 Reduksi Data tentang Sumber Daya Manusia.....	58
Tabel 5.3.2.2.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	60
Tabel 5.2.3.2.2 Reduksi Data tentang Kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada.....	61
Tabel 5.2.4.1.1 hasil wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	63

Tabel 5.2.4.1.2 Reduksi Data tentang Keleluasaan dalam memberikan pemikiran dan masukan.....	64
Tabel 5.2.5.1.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	67
Tabel 5.2.5.1.2 Reduksi Data tentang Mengetahui Pengelolaan Unit Usaha.....	68
Tabel 5.2.5.2.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	70
Tabel 5.2.5.2.2 Reduksi Data tentang Sosialisasi.....	71
Tabel 5.2.6.1.1. Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	73
Tabel 5.2.6.1.2 Reduksi Data tentang Sikap.....	74
Tabel 5.2.6.2.1 Hasil Wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah dan Ketua Unit Jasa Keuangan.....	76
Tabel 5.2.6.2.2 Reduksi Data tentang Keyakinan.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 Model Penelitian.....	17
Gambar 5.1.1.1 Unit Usaha Penyewaan Alat-Alat.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara.....	88
Lampiran 2. Foto Dokumentasi Penelitian.....	92
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian.....	95
Lampiran 4. Keputusan Kepala Desa Nanjung Nomor 145 Tahun 2018.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, dalam praktiknya para aktor pelaksana kebijakan sering menghadapi hambatan, dalam konteks implementasi kebijakan hambatan yang sering dialami adalah sumber daya manusia dan sumber daya non-manusianya

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang meliputi semua orang yang melakukan kegiatan didalam suatu organisasi.¹ orang sangat berperan didalam organisasi yaitu dengan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan didalam suatu organisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh para aktor dalam melaksanakan suatu kebijakan

Hambatan lain yang dialami dalam melaksanakan kebijakan juga mengenai sumber daya non-manusia, sumber daya non-manusia merupakan mesin, modal, insentif, teknologi, bahan-bahan atau material dan lain-lain dalam melakukan kegiatan didalam suatu organisasi.² Oleh karena itu sumber daya non-manusia juga menjadi salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh para aktor dalam melaksanakan kebijakan

¹ Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta; ANDI, 2003) hal,1

² Ibid.,

Salah satu kebijakan yang saat ini sedang diimplementasikan oleh setiap Desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan penelitian terdahulu dalam mengimplementasikan kebijakan yang terumus didalam Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa masih banyak hambatan yang dihadapi oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Engkus, Sakti dan Nanang di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat yang berjudul Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupate Ciamis. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program BUMDes yang tercantum di Peraturan Desa Lumbungsari No. 7 Tahun 2016 tentang BUMDes menghadapi hambatan dalam pelaksanaan programnya adalah kecilnya modal dalam pembentukan BUMDes di Desa Lumbungsari, sehingga cukup sulit untuk mulai menjalankan pelaksanaan programnya. Selain kendala dalam segi finansial, ada juga hambatan yang lain yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pengurus BUMDes juga masih kurang kepada masyarakat³
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Yeni Fajarwati di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Hasilnya

³ Engkus, Sakti dan Nanang, 2020, *Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupate Ciamis*

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program BUMDes yang ada di Peraturan Desa No.7 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMDes Pagedangan Mandiri masih belum maksimal, karena ada beberapa faktor penghambat diantaranya, sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program secara kuantitas sangat kurang, dan dari segi kualitas sumber daya yang ada tidak terlalu paham dengan IT sehingga masih dilakukan pembukuan secara manual⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pertama pelaksanaan program BUMDes yang tercantum di Peraturan Desa Lumbungsari No. 7 Tahun 2016 tentang BUMDes, menghadapi hambatan dalam pelaksanaan programnya yaitu kecilnya modal dalam pembentukkan BUMDes di Desa Lumbungsari, sehingga cukup sulit untuk mulai menjalankan programnya. Selain kendala dalam segi finansial, ada juga hambatan yang lain yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pengurus BUMDes juga masih kurang kepada masyarakat

Dan pada penelitian yang kedua dalam pelaksanaan program BUMDes yang ada di Peraturan Desa No.7 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMDes Pagedangan Mandiri masih belum maksimal, karena ada beberapa faktor penghambat diantaranya sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program secara kuantitas sangat kurang dan dari segi kualitas sumber daya yang ada tidak terlalu paham dengan IT sehingga masih dilakukan pembukuan masih secara manual.

⁴ Yeni Fajarwati, 2016, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*

Jadi masalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa berdasarkan penelitian terdahulu adalah sumber daya manusia kurang memadai secara kuantitas sangat kurang dan dari segi kualitas sumber daya yang ada tidak terlalu paham dengan IT, Kecilnya modal yang didapat Badan Usaha Milik Desa sehingga cukup sulit untuk mulai menjalankan programnya dan kurangnya informasi kepada masyarakat yang menyebabkan kurangnya partisipasi dari masyarakat

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Salah satu Badan Usaha Milik Desa yang akan diteliti adalah Badan Usaha Milik Desa di Desa Nanjung, yang secara hukum sudah disahkan pada tahun 2016 berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016063.AII.08.04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Usaha tentang Badan Usaha Milik Desa Nanjung.

Kepala Desa Nanjung dalam kaitannya dengan kegiatan pengelolaan BUMDes, melalui keputusan nomor 145/23/SKEP/VII/2018 menetapkan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana operasional yaitu:

Badan Usaha Milik Desa Nanjung memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu

1. Unit usaha penyewaan alat-alat pesta
2. Unit usaha bank sampah, dan
3. Unit usaha perantara atau jasa keuangan

Tujuan yang ingin dicapai oleh keputusan kepala desa nomor 145/23/SKEP/VII/2018 salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli

desa, keputusan ini diturunkan dari pasal 12 ayat 2 Peraturan Desa Nanjung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa Pelaksana Operasional berkewajiban:

- a) Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa
- b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya⁵

Ralitanya pelaksana operasional hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan unit usaha saja yaitu unit usaha penyewaan alat-alat pesta yang kegiatannya terbatas dalam waktu-waktu tertentu untuk bisa menghasilkan pendapatan. Hal ini mengakibatkan Badan Usaha Milik Desa Nanjung dari didirikan dan disahkan hingga penelitian ini dilaksanakan tidak ada kontribusi sedikitpun terhadap Pendapatan Asli Desa

Unit Usaha Bank Sampah tidak berjalan karena kekurangan pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Unit Bank Sampah Badan Usaha Milik Desa Nanjung sebagai berikut : *“Pegawai disini sangat kurang sekali untuk melaksanakan kegiatan, Pegawai di Bank Sampah ini ada 2 Pegawai Buruh.*

⁵ Pasal 12 ayat 2 Peraturan Desa Nanjung Nomor 1 Tahun 2015

idealnya pegawai buruh bank sampah harus ada 17 orang untuk kegiatan ini berjalan, pegawai dalam hal yang memilah-milah sampah kering dan basah itu minimal harus ada 5 orang, 5 orang pegawai lagi yang memilah-milah sampah yang bisa dijual dan tidak bisa dijual, 5 orang pegawai lagi untuk yang mengurus sampah plastik dan 2 orang pegawai untuk yang menimbang sampah.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Bank Sampah, salah satu indikasi tidak dilakukannya kegiatan unit usaha Bank Sampah di Badan Usaha Milik Desa Nanjung sumber daya yang tidak memadai yaitu sumber daya manusia secara jumlah sangat kurang untuk melaksanakan kegiatan bank sampah

Salah satu indikasi masalah Unit Usaha Jasa Keuangan tidak berjalan karena pegawai yang ada tidak paham dengan IT. Hal ini disampaikan oleh Ketua Unit Jasa Keuangan Badan Usaha Milik Desa Nanjung sebagai berikut : *“Usaha Keuangan ini ada 3 orang pegawai yaitu Ketua Unit, Bendahara dan Sekretaris, tetapi tidak ada yang bisa menggunakan laptop atau komputer dalam hal administrasi yang menyebabkan kami kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya juga.”⁷* Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Unit Jasa Keuangan, salah satu indikasi tidak dilakukannya kegiatan unit usaha Jasa Keuangan di Badan Usaha Milik Desa Nanjung sumber daya yang tidak memadai yaitu sumber daya manusia yang ada tidak terlalu paham dengan IT

⁶ Hasil Wawancara dengan E selaku Ketua Unit Usaha Bank Sampah, pada tanggal 20 Desember 2021

⁷ Hasil Wawancara dengan D selaku Ketua Unit Jasa Keuangan pada tanggal 20 Desember 2021

Pelaksana operasional yang tidak menjalankan kegiatan unit usaha yang sudah diputuskan oleh kepala desa tidak diberikan sanksi oleh BUMDes, Hal ini disampaikan oleh Ketua Unit Usaha Jasa Keuangan sebagai berikut: *“Tidak ada sanksi sama sekali a”*⁸ Berdasarkan wawancara dengan Ketua Unit Usaha Jasa Keuangan menunjukkan bahwa salah satu indikasi tidak dilakukannya kegiatan unit usaha di Badan Usaha Milik Desa Nanjung karena tidak adanya sanksi bagi pelaksana operasional yang tidak melaksanakan kegiatan unit usaha yang sudah diputuskan oleh kepala desa

Dan menurut Ketua Unit Penyewaan Alat-alat bahwa pengawasan yang ada hanya melibatkan perorangan saja bukan membentuk sebuah tim, hal ini disampaikan sebagai berikut: *“Pengawasan mah aya a ti pengawas, ngan perwakilan hungkul a nyalira”*⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ketua Unit Penyewaan Alat-alat menunjukkan bahwa salah satu indikasi tidak dilaksankannya kegiatan unit usaha adalah pengawasan yang diberikan hanya melibatkan perorangan saja bukan membentuk sebuah tim

Berdasarkan kerangka ini maka pertanyaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab pasti yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan unit usaha bank sampah dan unit usaha jasa keuangan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa?

⁸ Hasil Wawancara dengan D selaku Ketua Unit Jasa Keuangan pada tanggal 20 Desember 2021

⁹ Hasil Wawancara dengan AM selaku Ketua Unit Usaha Penyewaan Alat-Alat pada tanggal 21 Desember 2021

1.3 Tujuan Penelitian

Dan berdasarkan permasalahan yang muncul dari Latar Belakang maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab pasti yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan unit usaha bank sampah dan unit usaha jasa keuangan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab pasti yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan unit usaha bank sampah dan unit usaha jasa keuangan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa. Selain daripada itu, penelitian ini juga untuk memberikan bahan masukan bagi Badan Usaha Milik Desa Nanjung dan Pemerintah Desa Nanjung dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk kedepannya

1.5 Sistematika Penulisan

Terdapat 6 (enam) bab dalam penelitian ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Mendeskripsikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Mendeskripsikan mengenai teori-teori yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dari Tipe penelitian, Lokasi Penelitian, Partisipan Penelitian, Prosedur Pengambilan Data, Analisis Data, dan Pengujian Keabsahan Data

BAB IV: Gambaran Umum

Terdiri dari Gambaran Umum wilayah Desa Nanjung, Visi dan Misi Desa Nanjung, Kependudukan, Struktur Organisasi Desa Nanjung, Gambaran Umum BUMDes Desa Nanjung, Profil BUMDes Desa Nanjung dan Visi dan Misi BUMDes

BAB V: Hasil Dan Pembahasan

Berisi uraian hasil temuan selama proses penelitian berlangsung mengenai Ketidakpatuhan Pelaksana Operasional dan jawaban rumusan masalah mengenai apakah Insentif dan Sanksi, Pemantauan, Sumber Daya, Otonomi, Informasi, Sikap dan Keyakinan yang menyebabkan pelaksana operasional tidak melaksanakan dua kegiatan yang sudah diputuskan oleh Kepala Desa

BAB VI: Kesimpulan Dan Saran.

Berisi uraian kesimpulan dari temuan dan saran yang diberikan untuk hasil temuan penelitian.

